



SEMINAR NASIONAL

“Dari Puro Pakualaman untuk Nusantara”

Sumbang Swara Dalam Membangun Pendidikan Karakter Bangsa

PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA DALAM KONSEP KEBUDAYAAN KI HAJAR DEWANTARA

Dalam Rangka :

1. Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2010
2. Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2010
3. 11 Tahun Jumenengandalem K.G.P.A.A. Paku Alam IX 26 Mei 2010

Pusat Studi Pendidikan Kearifan Lokal
Suwardi Suryaningrat Puro Pakualaman
Kerjasama Paguyuban Trah Pakualaman Hudyono
2010

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
Daftar Isi	v
• Pendidikan Karakter Menuju Manusia Indonesia Seutuhnya Oleh : Jend. Ki Tyasno Sudarto	1
• Pendidikan Nasional Berdasar Konsep Kebudayaan Nasional Ki Hajar Dewantara Oleh : Prof. Sutaryo	4
• Aplikasi Pendidikan Berbasis Budaya Untuk Indonesia Kini (Berdasar Pada Konsep Pendidikan dan Kebudayaan Ki Hadjar Dewantoro) Oleh : Ki Wuryadi	21
• Kadipaten Pakualaman Dan Restorasi Pendidikan Oleh : Ki Priyo Dwiwarso	37
• Mengakarkan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter Bangsa Suatu Pesan Budaya Ki Hadjar Dewantara Oleh : Hajar Pamadhi	41
• Pembinaan Generasi Muda Melalui Alam Keluarga dalam <i>Wewarah Resi Wasitadrena anggitanipun K.P.H. Suryaningrat</i> Oleh : B.R.Ay. Atika Suryodilogo	60
• Mampukah Kita Menjawab Kekhawatiran Ki Hadjar Dewantara ? Oleh : Indria Laksmi Gamayanti	78

- Ki Hajar Dewantara Dan Pendidikan Karakter
Oleh : HY. Agus Murdiyastomo, M.Hum. 93
- Pendidikan Karakter Bangsa Dalam Bingkai
Ki Hajar Dewantara
Tinjauan Perspektif Ketuhanan YME
Oleh : Sutomo Parastho 104
- Pembangunan Watak Bangsa Menurut
Paku Alam II : Ajaran *Sēstradi* Sebagai Bekal Hidup
Oleh: Sri Ratna Saktimulya 127

KI HAJAR DEWANTARA dan PENDIDIKAN KARAKTER

Oleh : HY. Agus Murdiyastomo, M.Hum.

A. Pendahuluan

Perilaku negatif oknum Bangsa Indonesia, baik dari kalangan pelajar dan mahasiswa, masyarakat umum, maupun aparat pemerintah, yang kini marak dipertontonkan oleh media televisi telah menunjukkan terjadinya kebobrokan moral. Bagi kelompok masyarakat lainnya yang masih memegang teguh nilai-nilai moral, hal tersebut tentu menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Bagi generasi tua, situasi sekarang yang penuh dengan perilaku buruk, juga menimbulkan romantisme, mereka merindukan situasi di masa lampau yang penuh dengan kejujuran dan kesantunan. Dampak dari banyaknya perilaku yang menunjukkan kebobrokan moral ini, sekali lagi dunia pendidikan menjadi terdakwa, terutama dengan hilangnya pelajaran budipekerti dari kurikulum. Lembaga pendidikan formal kemudian dituduh hanya mengejar angka kelulusan yang tinggi. Hal ini dimungkinkan angka kelulusan yang tinggi pada Ujian Nasional akan dapat meningkatkan pamor sekolah. Dengan demikian pelajaran yang tidak diujikan pada Ujian Nasional sedikit dikesampingkan, termasuk pelajaran yang memuat pesan moral atau pembentukan karakter seperti pelajaran sejarah. Lebih jauh dari hal tersebut seolah pendidikan diarahkan untuk mencapai kecerdasan intelektual, tetapi mengabaikan kecerdasan spiritual, dan sosial.

Kurikulum pendidikan yang dahulu memuat pelajaran budipekerti sehingga peserta didik dibekali pengertian,

bagaimana harus bersikap dan berperilaku. Akan tetapi, pada perkembangannya sekarang dalam kurikulum berbasis kompetensi pelajaran budipekerti menghilang. Untuk memperbaiki hal tersebut, kemudian Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) diberlakukan. Dengan KTSP sekolah memperoleh kebebasan untuk mengembangkan materi, tetapi apakah pengembangan materi itu akan memasukan unsur-unsur pembentukan karakter? Jawabnya realita di lapangan perilaku peserta didik masih jauh dari harapan, masih jauh dari sopan-santun, atau dalam ungkapan Jawa sering disebut "*durung Jawa*". Lebih dari itu dewasa ini semakin terungkap bahwa nilai-nilai moral bangsa ini semakin merosot, terbukti korupsi terjadi di mana-mana.

Menghadapi realita itu, dan semakin langkanya kejujuran, tampak adanya kegamangan para ahli pendidikan. Tergopoh-gopoh mereka mencari solusi, dan kini diciptakan pendidikan karakter. yang pada prakteknya nanti akan disisipkan pada pelajaran yang ada. Dalam ketergesaan itu akankah pendidikan karakter berhasil untuk memperbaiki keadaan, atau justru semakin membebani para guru karena mereka harus mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam pelajaran. Apabila pendidikan karakter berhasil disisipkan ke dalam mata pelajaran yang ada, maka para murid akan belajar teori berkarakter (*How to Know*), bukan belajar berperilaku yang berkarakter (*how to do*). Di sisi lain sesungguhnya bangsa ini telah memiliki contoh bagaimana menerapkan pendidikan karakter, seperti yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara. Selanjutnya tulisan ini akan mencoba mendiskusikan kembali apa yang dilakukan Ki Hadjar, khususnya yang berkaitan dengan karakter, dalam perspektif sejarah.

B. Ki Hadjar Dewantara

Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Soewardi Soeryaninrat pada tanggal 2 Mei 1889, ia merupakan anak ke-5 dari 9 bersaudara. Ayahnya Kanjeng Gusti Hadipati Haryo Soerjaningrat adalah putra mahkota, tetapi karena ia kehilangan penglihatan akibat sakit yang diderita ketika masih kanak-kanak, mengakibatkan ia kehilangan haknya sebagai putra mahkota. Pangeran Soerjaningrat kemudian mendalami seni sastra dan karawitan, hingga ia dikenal sebagai ahli di dua bidang seni itu. Suasana seni yang berakar pada budaya Jawa di lingkungan keluarga Pangeran Soerjaningrat ini, rupanya sangat berpengaruh pada perkembangan jiwa Soewardi kecil. Pengaruh tersebut tampak pada ide-ide dan sepak terjangnya di kemudian hari, yang selalu kental dengan budaya Jawa. Ketika ia mendirikan Taman Siswa, dan mengubah namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara, konsep pendidikan yang diterapkannya didasari oleh budaya Jawa Sepak terjang Ki Hadjar Dewantara ternyata diapresiasi oleh lembaga pendidikan, hingga pada tahun 1956 Ki Hadjar Dewantara memperoleh gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang ilmu Budaya dari Universitas Gadjah Mada.

Selain sebagai budayawan Ki Hadjar juga dikenal sebagai pejuang di bidang politik, ia bergabung dengan dr. Cipto Mangunkusumo, dan E.F.E. Douwes Dekker (Danudirdjo Setyabudhi) dalam Indische Partij (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008 : 271). Ketiga tokoh ini kemudian dikenal dengan tiga serangkai, artikel mereka yang dimuat dalam *De Expres* tanggal 26 Juli 1913 menghebohkan kaum kolonialis. Kritik tajam yang dilontarkan pada pemerintah kolonial, berkaitan dengan perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis, mengakibatkan ketiganya

dibuang ke negeri Belanda. Pengasingan ternyata tidak mampu melemahkan perjuangan Soewardi, bahkan sebaliknya pengasingan justru mendewasakannya. Dari pergaulannya dengan banyak tokoh baik sebangsa, maupun tokoh dari Belanda, dan diskusi-diskusi yang dilakukannya mendorong Soewardi mendalami masalah pendidikan.

Sepulangnya dari pengasingan Soewardi Soerjaningrat mendirikan Taman Siswa, yang merupakan lembaga pendidikan sebagai sarana perjuangannya. Pendirian Taman Siswa juga dianggap sebagai titik balik perjuangan bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, dengan mengedepankan pendidikan. Dengan demikian seolah Soewardi mengesampingkan perjuangan politik, yang selama ini dilakukannya, tetapi justru ia dapat lebih maksimal berjuang untuk bangsanya. Pendidikan yang didasari oleh semangat dan jiwa kebangsaan merupakan dasar perjuangan untuk meningkatkan derajat bangsa, agar sejajar dengan bangsa lain di muka bumi. Ki Hadjar Dewantara berhasil mendidik angkatan muda dengan azas kebangsaan, dan membentuk karakter anak didiknya berdasarkan budaya bangsa dan religiusitas.

Menanggapi berdirinya Taman Siswa dengan azas pendidikannya, ada yang mendukung dan menyambut baik, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara adalah langkah mundur. Tanggapan tersebut tentu diikuti dengan alasan-alasan yang mereka anggap benar, namun Ki Hadjar Dewantara, tidak menanggapi kritik yang dilontarkan kepadanya dengan kata. Ki Hadjar Dewantara tetap kokoh dengan pendiriannya, dan lebih memilih bekerja bersama para pendukungnya untuk membuktikan bahwa apa yang ia lakukan benar.

Taman Siswa sebagai sebuah lembaga pendidikan partikelir, yang dikelola oleh seorang pribumi berdarah biru, mempunyai tujuan untuk mendidik generasi muda agar berjiwa kebangsaan. Oleh karena itu Ki Hadjar Dewantara menolak pemberian subsidi pemerintah. Hal itu dilakukan agar Taman Siswa menjadi lembaga pendidikan yang mandiri, tidak tergantung dan terikat oleh pemerintah, sehingga dapat menerapkan kurikulumnya sendiri. Keberanian Ki Hadjar Dewantara menolak subsidi, dan kurikulum dari pemerintah mendapat dukungan dari partai-partai yang ada, terbukti partai memasukan pendidikan ke dalam programnya. Lebih dari itu Boedi Oetomo menyerahkan sekolah yang lebih dulu didirikan di Jatibaru Jakarta, kepada Taman Siswa (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008 : 273). Sejak Taman Siswa didirikan tahun 1922 terus berkembang, hingga pada tahun 1930 telah mempunyai 40 cabang, 3 diantaranya berada di Sulawesi, 4 di Kalimantan Selatan dan Timur. Dari seluruh cabang yang ada menampung murid sejumlah 5140 peserta didik, yang tersebar di berbagai tingkat..

Besarnya dukungan dan perhatian masyarakat terhadap Taman Siswa menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah kolonial, terutama ketakutan terhadap kemungkinan Taman Siswa dijadikan alat ideologi. Oleh karenanya berbagai cara ditempuh pemerintah kolonial untuk menghentikan Taman Siswa. Cara-cara lama dengan menangkap dan mengasingkan tidak mungkin diterapkan pada Ki Hadjar Dewantara, maka dicarilah cara lain melalui aturan produk hukum. Namun ternyata mulai dari *Onderwijs Ordonnantie*, sampai *Kindertoelage* yang diterapkan pemerintah kolonial tidak berhasil melumpuhkan Taman Siswa yang terus berkembang dengan nasionalisme kebudayaan.

Apalah artinya suatu kemerdekaan (politik), jika rakyatnya tak terdidik, dan terlebih tercabut akar budayanya. Dapat dipastikan mereka tidak mempunyai identitas yang jelas, perilaku mereka mengimitasi orang Belanda, bahkan lebih menyedihkan sebagian orang mengaku orang Belanda "hitam-hitam Belanda juga". Dari contoh itu sangat tepat kiranya apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara, yang memegang teguh budaya sendiri dan ditanamkan kepada semua anak didiknya. Melihat realita itu tidak salah apa yang disampaikan dr Sardjito bahwa perjuangan Ki Hadjar Dewantara meliputi tiga aspek yaitu, 1. Perjuangan kemerdekaan nasional, 2. Perjuangan pendidikan. dan 3. Perjuangan kebudayaan. Ketiga aspek tersebut satu dan yang lain tidak dapat dipisahkan (Sardjito, 1956).

C. Pendidikan, Kebudayaan dan Karakter

Di dalam perjuangan menuju kemerdekaan dalam arti luas, tidak dapat dipisahkan antara politik, pendidikan, dan kebudayaan. Sehubungan dengan itu pengajaran yang dilakukan di Taman Siswa berpegang pada 7 azas (Abdurrachman Suryomiharjo, 1986 : 88-89), yang intinya dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pasal I berisi dasar kemerdekaan dan dasar kodrat alam yang diwujudkan dengan sistem among.
2. Pasal II berisi dasar kemerdekaan
3. Pasal III berisi sifat pendidikan untuk kepentingan sosial, ekonomi dan politik, untuk itu diterapkan kebudayaan nasional sebagai dasar pendidikan.
4. Pasal IV berisi dasar kerakyatan

5. Pasal V berisi kepercayaan akan kekuatan sendiri dalam mengembangkan pendidikan.
6. Pasal VI berisi keharusan menggunakan kekuatan sendiri, dan menghindari bantuan dari pihak lain yang mengikat.
7. Pasal VII berisi, guru harus mendampingi murid-muridnya ketika mereka belajar.

Pada terapannya 7 pasal tersebut jika dilihat dari tujuannya maka dapat dijelaskan bahwa pasal 1 dan 2 mengandung maksud kemerdekaan diri. Artinya, setiap murid dibebaskan untuk mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing, dan mengatur dirinya sendiri. Dalam pembelajaran, para murid diarahkan agar mampu berolah pikir, rasa, dan karya secara merdeka, dalam rangka menciptakan suasana tertib dan damai, yang mendasari sistem among. Dalam sistem among tersebut seorang guru menempatkan diri di belakang, untuk memberi kesempatan para murid berjalan sendiri, inilah yang disebut *tut wuri handayani*. Saat yang lain seorang guru menempatkan diri di antara murid-muridnya, untuk memberi semangat dan motivasi, dan petunjuk, inilah yang disebut dengan *ing madya mangun karso*. Pada kesempatan lain seorang guru harus mampu berdiri di depan, di sana seorang guru harus mampu memberi contoh yang baik atau teladan, karena seorang guru harus dapat *digugu lan ditiru*. Hal yang terakhir ini disebut *ing ngarso sung tulada*. Pasal 3 menyangkut pengembangan diri dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Bangsa kita merupakan bangsa yang luwes dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga banyak anak bangsa yang hidup kebarat-baratan, sehingga tidak cocok dengan budaya sendiri. Pendidikan mengejar kecerdasan intelektual, tetapi mengabaikan kecerdasan sosial, dan spiritual. Oleh sebab itu

agar bangsa ini berkembang dengan baik berkarakter dan beridentitas, penting rasanya untuk menggali kembali pembelajaran berdasarkan budaya seperti yang diterapkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Pasal 4 menunjukkan bahwa pendidikan harus berwawasan kerakyatan, artinya pendidikan sebaik apapun tidak akan banyak berarti, jika hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pasal 5 dan 6 merupakan penunjang pasal 4, setiap orang harus percaya akan kemampuan dirinya, termasuk dalam hal pembiayaan. Pasal 7 menunjuk keikhlasan para guru untuk bekerja, mendekati murid-muridnya (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2008 : 272).

Pernyataan 7 pasal pendidikan yang disampaikan Ki Hadjar Dewantara, sungguh menarik perhatian kaum pergerakan. Sebagian yang tidak setuju mengkritik Ki Hadjar Dewantara sebagai agen komunis, tetapi kritik itu tidak dilayani secara frontal. Semua kritik baik dari bangsa sendiri maupun dari kaum kolonialis dijawab dengan karya, dan dijelaskan melalui tulisan yang dimuat dalam majalah pendidikan *Wasita* yang terbit tahun 1928. Di samping kritik, Banyak pula yang setuju dan mendukung gagasan dan apa yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara. Boedi Oetomo bahkan menyerahkan sekolah yang didirikannya kepada Taman Siswa, PPPKI mengundang Ki Hadjar Dewantara untuk berbicara tentang pendidikan, dalam kongres mereka di Surabaya pada tahun 1928. Dijelaskan Oleh Ki Hadjar Dewantara hubungan pendidikan dan politik, pendidikan yang meningkatkan martabat bangsa, adalah pendidikan yang didasarkan atas nilai-nilai budayanya sendiri. Politik bertugas untuk mengawal dan memagari agar dunia pendidikan tidak dimasuki unsur-unsur budaya asing yang akan mengaburkan identitas anak bangsa.

Cara yang ditempuh dalam pendidikan dan pengajaran adalah membawa anak didik ke dalam suasana rumah dan lingkungannya sendiri, dan nilai-nilai luhur budaya sendiri ditanamkan kuat-kuat melalui permainan dan nyanyian yang disesuaikan dengan alam pikiran. Dengan cara itu anak akan berkembang menjadi manusia yang berjiwa merdeka, yang terikat dengan nilai-nilai budayanya sendiri, bebas dari pengaruh negatif budaya asing, kebencian, dan tidak rendah diri, berhadapan gemerlapnya budaya lain. Dengan demikian anak akan dididik menjadi putra bangsa yang cinta dan setia pada tanahairnya, hingga berkembang pula jiwa patriot dan semangat pengabdian bagi nusa dan bangsanya.

Untuk mencapai tujuan pendidikan manusia yang cerdas, dan berkarakter, tentunya bukan hanya tanggungjawab lembaga pendidikan, maka Ki Hadjar Dewantaraman menyampaikan arti pentingnya tiga pusat pendidikan yaitu, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini, satu dan yang lain harus saling mendukung, hingga ada keseimbangan di antara ketiganya, karena ketiganya menentukan baik-buruknya seorang anak didik dikemudian hari. Di lingkungan keluarga seorang anak mendapat perlindungan sekaligus belajar tentang ketaqwaan kepada Sang Pencipta, cinta dan kasih sayang, tolong-menolong, dan tanggungjawab, dari nasehat dan teladan orang tuanya, sehingga seorang anak memperoleh kepekaan spiritual. Lingkungan sekolah anak didik memperoleh pelajaran, tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memperoleh kecerdasan intelektual. Lingkungan masyarakat, mengajarkan tentang kehidupan, kepada anak didik, sehingga anak memiliki kecerdasan sosial.

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas, jelaslah kini bahwa apa yang dipikirkan, dan dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara telah melampaui teman-teman seangkatannya. Apa yang dipikirkan Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan dan kebudayaan ternyata masih relevan hingga sekarang. Ketika bangsa ini mengalami kerisauan akibat banyaknya penyimpangan perilaku baik oleh para pejabat, pegawai, maupun orang kebanyakan, dengan tindakan korupsi, pemaksaan kehendak, dan perusakan, menunjukkan kurangnya kecerdasan sosial, dengan mendahulukan kepentingan pribadi.

Pendidikan dengan berbagai kurikulum yang silih berganti diterapkan, ternyata hanya menghasilkan kecerdasan intelektual saja. Dampaknya kepandaian yang dimiliki tidak diperuntukan bagi kemuliaan sesama, kepedulian terhadap nasib orang lain seolah terkubur oleh nafsu hedonis yang tidak pernah terpuaskan. Banyak usulan tentang pendidikan yang membangun karakter, tetapi Bangsa ini barangkali lupa bahwa Bangsa Indonesia memiliki Bapak Pendidikan yang telah menghasilkan konsep pendidikan. Selayaknyalah jika bangsa ini mempertimbangkan kembali konsep-konsep yang disampaikan Ki Hajar, yang pada dasarnya pendidikan harus berakar pada budaya sendiri, bukan pendidikan yang meniru milik orang lain.

Daftar Pustaka

.Abdurrachman Suryomiharjo. *Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta : Sinar Harapan, 1986.

Cakrawala Pendidikan, Mei 2010, Th. XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY, Yogyakarta : ISPI-DIY dan LPM UNY.

Kebangkitan Pendidikan Nasional: Menggali Butir-butir Pemikiran Pendidikan Ki Hadjar Dewantara untuk Memaknai Kebangkitan Nasional. Yogyakarta : Trah Hudyono, 2008.

Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta : Balai Pustaka, 2008

Ricklef, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2002.